

**PERAN PENDAMPING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN KERTANEGARA
KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

DWI SAFITRI

NIM. 1617104011

IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwisafitri

Nim : 1617104011

Jenjang : S1

Jurusan : Pengembangan Masyarakat

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan menjadi karya saya dalam skripsi ini diberitanda Citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, September 2021

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METEMAL 1000' and '9DC1DA/005198751'.

Dwi Savitri
NIM. 1617104011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-835624, 628250, Fax : 0281-836553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**PERAN PENDAMPING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN
PURBALINGGA**

yang disusun oleh Saudara **Dwi Safitri**, NIM **1617104011**, Program Studi, **Pemberdayaan Masyarakat Islam** Jurusan **Pengembangan Masyarakat Islam**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **16 juli 2021**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,

Uus Uswatusholih
Nip:197703042003122001

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Imam Alfi, M.Si
NIP:198606062018011001

Penguji Utama,

Dra. Amirotnun, S.M.Si
NIP: 196510061993032002

IAIN PURWOKERTO

Mengesahkan,

Tanggal _____

Dekan,

Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth Dekan
Fakultas Dakwah
IAIN Purwokerto
Di Tempat

Asalamualaikum Wr,Wb

Setelah melakukan bimbingan telaah, dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara :

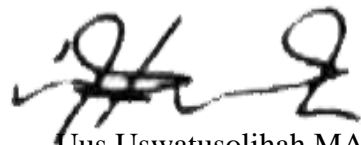
Nama : Dwi Safitri
Nim : 1617104011
Jenjang : S1
Jurusan : Pengembangan Masyarakat
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diujikan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk diuji dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (S.Sos), demikian atas perhatiannya saya ucapkan trimakasih.

Wasalamualaikum Wr,Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 30 Mei 2021
Pembimbing



Uus Uswatusolihah.MA.
Nip:19770304200312200

MOTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqunti. Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no:3289)



PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan seizin-Nya, segala rasa syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, dan dengan ketulusan hati penulis persembahkan karya tulis ini kepada kedua orang tua tercintanya itu Ayah handa Nurcholis dan Ibunda Juminah yang telah susah payah membekali segalanya untuk penulis selamakuliah dan yang telah mendo'akan serta memberikan dukungan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan diberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat untuk mereka berdua, karena dengan doa beliau yang telah mempermudah segala urusan penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya kepada anggota komplek an-nur angkatan 2016 atas dukungan, bantuan dan do'a yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Karyatulisini juga penuli spersembahkan untuk Almamater Fakultas Dakwah dan Kampus IAIN Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan. Sebagai tanda bukti serta rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis persembahkan karyatulis ini kepada siapapun yang telah membaca karya tulis penulis, dan orang-orang yang penulis sayangi dan menyayangi penulis yang telah mendukung maupun mengingatkan penulis untuk menempuh sebagai Sarjana Sosial (S.Sos) sehingga dapat menyelesaikan proses belajar dan kepenulisan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa yang diberikan ini belum bias membayar kebaikan kalian semua. Namun, setidaknya inilah yang dapat penulis persembahkan untuk kalian. Teman-teman dan sahabat-sahabat penulis yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas Do'a kalian, dukungan dan bantuan dari kalian. Semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pengabdian penulis kepada kedua orang tua, keluarga dan masyarakat.

**PERAN PENDAMPING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN KERTANEGARA
KABUPATEN PURBALINGGA**

**DWI SAVITRI
NIM. 1617104011**

ABSTRAK

Dari begitu banyaknya masyarakat miskin yang kehidupannya sangat memprihatinkan, namun hanya sedikit yang menikmati Program Keluarga Harapan, kehidupan masyarakat dari semenjak dilakukan pendataan melalui sensus penduduk pada tahun 2011, sudah berbeda dengan kehidupan masyarakat pada saat ini. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Salah satunya di Kecamatan Kartanegara Kab.Purbalingga. Kecamatan yang ikut berperan aktif dalam melaksanakan program PKH. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana pendamping PKH dalam menjalankan program PKH di kecamatan Kartanegara.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat. Dalam hal pendamping PKH. Ruang lingkup pembahasannya, bahwa di sini peneliti meneliti yang dilakukan pendamping PKH dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kartanegara Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldresearch) menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menemukan bahwa dan fungsi pendamping dalam pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai objek dan subjek pemberdayaan, yakni melakukan pemberdayaan masyarakat terkhusus pada kelompok rentan dan lemah agar mereka mempunyai sebuah kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari jeratan kemiskinan, kelaparan, kebodhan dan bebas dari kesakitan. Dan mengevaluasi program kerja. Dengan demikian program pkh di kecamatan kartanegra dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ada perbaikan program pada saat pelaksanaan program maupun setelah pelaksanaan program yang dilaksanakan.

Kata kunci :, Pendamping PKH, Program PKH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr.wb

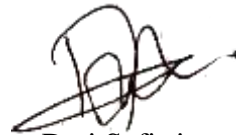
Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya sampai pada umatnya hingga akhir zaman. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Makadari itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Basit, M.Ag. Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Agus Sriyanto, M.Si Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Ibu Uus Uswatusolihah, MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran dan ketulusan serta motivasi yang dapat membangun penulis untuk lebih baik lagi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Para Dosen serta Staff Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama penyelesaian studi.
6. Ayahanda Nurcholis dan Ibunda Juminah, kedua orang tua penulis serta keluarga besar penulis ucapkan terimakasih atas do'a, dukungan, bimbingan dan motivasi yang tak pernah putus untuk penulis.
7. 7.Bapak Teguh selaku Pendamping, terimakasih atas dukungan serta memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian maupun penyelesaian skripsi.

8. Semu ateman-teman PMI Angkatan 2016, dan teman teman satu komunitas maupun organisasi yang telah membantu penulis, terimakasih atas kebersamaan maupun kenang-kenangan yang tak pernah terlupakan.
9. Semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada kalian semua. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokerto, 30 Mei 2021

Penulis



Dwi Safitri

NIM. 1617104011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Kerangka Teori.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran.....	19
1. Devinisi Peran	19
2. Jenis Peran.....	19

3. Struktur Peran	20
4. Fungsi Peran.....	21
5. Teori Peran	22
6. Penyuluh atau Fasilitator.....	23
B. Pemberdayaan	24
1. Definisi Pemberdayaan	24
2. Kelompok lemah dan Ketidakberdayaan	26
3. Indikator Keberdayaan	27
4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	29
5. Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	30
C. Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.....	30
1. Definisi Pkh.....	30
2. Indikator Penerima Pkh.....	32
3. Pendamping Pkh.....	34
4. Persyaratan Umum Pendamping Pkh.....	35
5. Evaluasi	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Kertanegara	45
1. Kondisi Wilayah.....	45
B. Hasil Penelitian dan Analisis Pembahasan	46
1. Program Keluarga Harapan.....	46
2. Pendamping PKH.....	47
3. Peran Pendamping PKH.....	59
4. Peserta dan Pendamping PKH Kecamatan Kartanegara...	67
C. Pendamping PKH dan peserta KPM dalam Bingkai Teori Peran.....	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72
C. Penutup.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Indeks Besaran Bantuan Yang diterima peserta PKH	33
Tabel 1.II	Data Tahap Ke Tiga PKH Kecamatan Kertanegara Tahun 2020	67
Tabel 1.III	Data Peserta PKH Kecamatan Kertanegara Tahun 2020	69



BAB I

Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Program sejenis dengan Program Keluarga Harapan pertama kali diimplementasikan di sejumlah negara Amerika Latin dan Karibia. Tingkat kecerdasan, kekayaan, dan kemakmuran suatu bangsa tidak dipengaruhi oleh usia Negara itu atau ketersediaan sumber daya alam. Banyak pihak yang tidak memahami dan tidak bertindak konsisten dengan kenyataan bahwa sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh mutu gizi, kesehatan, dan pendidikan di usia dini dan di masa pertumbuhan anak.¹

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Peserta PKH adalah masyarakat yang masuk kedalam 14 kriteria miskin yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan memiliki tanggungan ibu hamil, bayi usia di bawah 5 tahun, dan tanggungan anak sekolah sampai dengan tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat di dalam satu rumah

¹Habibulloh, "Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang", *Jurnal informasi*, Vol. 16, No 02, (Jawa Barat: Karawang: 2011), hal. 10.

tangga. Program ini telah dilakukan di Indonesia sejak tahun 2007 di bawah naungan Kementerian Sosial dan mengalami perluasan secara bertahap di beberapa daerah di Indonesia. Program ini memiliki hubungan kerjasama dengan sektor lain: Kementerian kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, BPS, dan PT Pos Indonesia.²

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin, sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, di harapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.³

PKH di latar belakang karena masih banyaknya Rumah Tangga Sangat Miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik dari sisi RTMS maupun dari sisi pelayanan. Pada sisi RTSM alasan yang terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah ialah karena tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah atau merasa pendidikannya sudah cukup, demikian dalam kesehatan RTMS tidak mampu untuk membiayai pemeliharaan atau

² Erna Fidyatun. "Evaluasi Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan di Kabupaten Brebes Tahun 2011", *Jurnal Kesehatan Masyarakat* , Vol. 1, No 2, (Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, 2012), hal. 26-36.

³ Apando Ekardo dkk, "Efektifitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir Kabupaten Pesisir Selatan", *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 3, No 1, (Sumatra Barat: PGRI, 2014), hal. 2

perawatan bagi anggota keluarganya akibat rendahnya pendapatan. Biaya yang tidak dapat dijangkau oleh RTSM atau jarak tempat tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh.

Kesehatan terintegrasi dengan berbagai sektor, karena kesehatan tidak akan lepas dari keadaan sosial masyarakat, terutama dalam hal perekonomian, status ekonomi menjadi tongkat utama yang menyokong kesehatan itu sendiri, karena itu dalam upaya peningkatan status kesehatan sangat diperlukan adanya kerjasama yang berkesinambungan, baik dalam pelaksanaan maupun dalam hal pengawasan. Salah satu program yang terintegrasi antara kesehatan dengan sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH).⁴

Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat miskin menjadi suatu permasalahan utama karena mereka cenderung mengabaikan kualitas kesehatan yang tergambar dalam statistik kesehatan ibu dan anak di Indonesia yang belum memuaskan. Rendahnya status kesehatan ibu akan berdampak terhadap janin atau bayi yang di kandungnya.⁵

Menurut Kementerian Sosial tahun 2016 terdapat beberapa kewajiban peserta PKH yaitu diantaranya ibu hamil atau nifas adalah pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali dalam 3 kali trisemeter,

⁴ Erna Fidyatun. "Evaluasi Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan di Kabupaten Brebes Tahun 2011", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1, No 2, . . . , hal. 26-36.

⁵ Shella Putri Permadani Hardi Antono dkk, "Pendamping Keluarga Harapan dalam Meningkatkan kunjungan Ibu Hamil Ke Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 14, No 2, (Jember: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, 2019), hal. 136.

melahirkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan.⁶ Program Keluarga Harapan merupakan salah satu diantara program-program penanggulangan kemiskinan tahun 2007. Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan ibu hamil atau nifas dan berada pada lokasi terpilih.

Sejak tahun 2012 untuk memperbaiki sasaran penerima PKH data awal untuk penerima PKH di ambil dari Basis Data Terpadu dari hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (TNP2K). sasaran PKH yang berbasis Rumah Tangga, terhitung sejakadanya hasil pendataan program perlindungan sosial tersebut berubah menjadi berbasis keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga yaitu (orang tua ayah, ibu dan anak) orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Oleh karena itu keluarga adalah unit yang sangat berdampak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam mencapai tujuan Program Keluarga Harapan maka gkat pendukung berupa kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program ini sangat di perlukan. Pada level nasional dibentuk tim kordinasi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pusat sampai pada tingkat Kabupaten terdapat tim kordinasi dan Unit Pelaksanaan Program Keluarga

⁶ Evi Rahmawati dkk, “*Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan*”*Jurnal of Nonformal Education and Empowerment*”, Vol. 1, No 2, (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negri Semarang, 2017), hal. 163.

Harapan Kabupaten. Pada tingkat Kecamatan Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah Pendamping Program Keluarga Harapan.⁷

Pendamping sering dikatakan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendamping merupakan pekerjaan sosial. Diantaranya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 angka 4 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan sosial.⁸

Pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (14) yang dimaksud pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Menurut Keputusan Menteri Sosial No.10/HUK/2007, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.⁹

Pendamping yang dimaksud adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan

⁷ Habibulloh, "Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang", *Jurnal Informasi*, Vol. 16, No 02, . . . , hal. 102.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial.

⁹ Evi Rahmawati dkk, "Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan" *Jurnal of Nonformal Education and Empowerment*", Vol. 1, No 2,,, hal. 163.

berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan pendamping dalam Program Keluarga Harapan adalah memberikan informasi penjelasan kepada peserta PKH tentang prosedur yang harus dilalui, melakukan validasi data peserta PKH, memberikan motivasi, pengawasan dalam pendampingan kepada peserta PKH agar memenuhi kewajiban-kewajibannya dan juga menjembatani peserta PKH dengan pihak-pihak lain yang terklibat ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Dengan adanya pendamping PKH maka peserta mendapatkan haknya khususnya dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi, taraf pendidikan anak-anak, status kesehatan dan gizi ibu hamil,¹⁰

Seharusnya pendamping PKH sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan dan sebagai teknis menjadi agen dalam pelaksanaan Program PKH, artinya pendamping PKH bisa memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta PKH, melakukan validasi data, memberikan motivasi, pengawasan, pendampingan kepada peserta PKH untuk melaksanakan kewajibannya, serta menjembatani peserta PKH dengan pihak-pihak lain di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Di Kecamatan Kertanegara berdasarkan observasi awal yang saya lakukan bahwa terdapat 11 Desa dengan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.380 RTSM, di setiap tahunnya penerima PKH di Kecamatan Kertanegara mengalami peningkatan, masalah demi masalah dari penerima PKH maupun masyarakat sering kali muncul terkait dengan

¹⁰ Usan Bagou, “ *Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara*” *Jurnal sumber daya manusia, Administrasi dan pelayanan public*, Vol. III, No 2, (Gorontalo, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo), hal. 131.

pendamping PKH di Kecamatan Kertanegara berjumlah 4 orang. Sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Kertanegara belum memahami apa arti dari PKH itu sendiri dan kriteria seperti apa yang berhak menerima Program PKH tersebut, dengan ketidak tahuan masyarakat tersebut akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial di antara penerima PKH dan yang tidak menerima PKH, yang tidak menerima PKH tersebut merasa tidak adil karena mereka menganggap yang menerima PKH tersebut lebih mampu dari yang tidak menerima. Hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh pendamping PKH itu sendiri.¹¹

Dari begitu banyaknya masyarakat miskin yang kehidupannya sangat memprihatinkan, namun hanya sedikit yang menikmati Program Keluarga Harapan, kehidupan masyarakat dari semenjak dilakukan pendataan melalui sensus penduduk pada tahun 2011, sudah berbeda dengan kehidupan masyarakat pada saat ini. Hal itu terjadi karena data dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementian Sosial RI yang menjadi rujukan awal dari pendamping dalam melakukan pengajuan data penerima PKH, namun saat ini masih banyak yang taraf kehidupannya sudah layak dan meningkat sudah tidak berhak lagi sebagai penerima PKH, disisi lain masih banyak lagi masyarakat miskin yang butuh akan bantuan melalui program PKH, namun sampai sekarang belum mendapatkan program PKH tersebut.¹²

¹¹ Wawancara dengan bapak Teguh, Pendamping yang bertugas di kecamatan Kertanegara pada tanggal, 30 Januari 2020.

¹²Wawancara dengan bapak Nur Holis, Petugas pendamping Kecamatan Kertanegara pada tanggal, 30 Januari 2020.

Program PKH diberikan untuk masyarakat yang memiliki anak yang masih sekolah, SD, SMP, dan SMA, dan untuk mereka yang hamil, memiliki balita dan lansia dengan memberikan tunai kepada mereka untuk dipakai sesuai prosedur yang di perintahkan oleh pemerintah, itu semua berharap dapat meningkatkan taraf pendidikan anak dari penerima program, serta peningkatan kesehatann melalui imunisasi ibu hamil dan balita, namun selama ini penerima penerima program sering menggunakan bantuan dana melalui PKH pada hal-hal yang tidak sesuai tengan tujuan PKH. Itu semua terlihat pada anak-anak yang masih menggunakan seragam sekolah tidak layak pakai dan juga pada ibu dan balita yang tidak melakukan imunisasi pada tempat atau fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga banyak sekali sekarang ini yang gampang terkena penyakit dan balita yang kurang baik pertumbuhannya. Itu semua terjadi karena pendamping PKH kurang memperhatikan dan kurang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan program oleh masyarakat penerima Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti apasaja tugas pendamping dalam melaksanakan tugasnyadan bagaimana pendamping dalam Program Keluarga Harapan dengan mengambil judul penelitian “ *Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga*”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman, maka perlu adanya definisi operasional yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian dan Definisi Operasional sebagai berikut:

1. Pendamping

Pendamping adalah suatu proses fasilitasi yang di lakukan oleh para pendamping yang ber untuk membantu, mengarahkan dan mencari jalan terhadap berbagai permasalahan. Mengacu pada hal tersebut, maka pendamping adalah orang yang ber membantu dan mencari jalan terhadap berbagai permasalahan dengan cara memfasilitasinya.

adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang di berikan baik secara formal maupun secara informal. pendamping adalah serangkaian prilaku yang diharapkan membantu dan mencari jalan terhadap berbagai permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dengan cara mendampinginya.¹³ pendamping adalah suatu tugas atau aktifitas yang di lakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan di perlukan bagi pembangunan. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial.¹⁴

¹³ Darastri latifah, dkk “ Pendamping Bagi Orang Dengan HIV\AIDS” *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*”, Vol. 2, No 3, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2017), hal. 307.

¹⁴ Evi Rahmawati dkk, “ Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan” *Jurnal of Nonformal Education and Empowerment*”, Vol. 1, No 2, . . . , hal. 164.

2. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Peserta PKH adalah masyarakat yang masuk kedalam 14 kriteria miskin yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan memiliki tanggungan ibu hamil, bayi usia di bawah 5 tahun, dan tanggungan anak sekolah sampai dengan Sekolah Lanjut Pertama (SLTA) di dalam satu rumah tangga.¹⁵

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.¹⁶

Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dan berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri

¹⁵Erna fidyatun,” *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kabupaten Brebes*” *jurnal kesehatan masyarakat*”, Vol. 1, No.2, . . . , hal. 26.

¹⁶ Khodziah Ianaini Kholif, dkk, “*Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*” *jurnal Administrasi Publik*”, Vol. 2, No. 4, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang 2017, hal. 711.

pelayanan kesehatanyang di perlukan bagi dirinya. Pemerintah memberikan jaminan kesehatan, baik untuk warga yang mampu maupun yang tidak mampu. Tanggung jawab pemerintah juga termasuk dalam penyesuaian sumber daya di bidang kesehatan.¹⁷

Tugas pendamping Program Keluarga Harapan kecamatan Kertanegara dalam bidang kesehatan yaitu untuk mendampingi ibu hamil atau nifas, menyusui, Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) balita dan lansia melalui sosialisasi pengenalan Program Keluarga Harapan hingga memastikan bahwa peserta Program Keluarga Harapan memenuhi segala komitmen untuk mengunjungi fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, Bidan Desa dan Sebagainya, sesuai dengan prosedur kesehatan serta memperoleh pelayanan dasar di bidang kesehatan.

3. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang di bahas penulis adalah:

1. Bagaimana Peran Pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Kertanegara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan:

¹⁷ Eliza Nur Fitriani,” Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan” *jurnal kebijakan dan administrasi public*,” Vol. 17, No. 02, Stikes Bhakti Husada Bengkulu 2013, hal. 39.

Mengetahui Pendamping yang di lakukan dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

1. Untuk memperoleh gambaran tentang Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan mampu mendukung teori pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga yang telah ada.
 - b. Penelitian ini di harapkan mampu menjadi refrensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang melakukan pemberdayaan untuk menentukan kebijakan yang akan di ambil dimasa mendatang
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pendamping sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan di masa mendatang.

E. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, penulis menelaah hasil kajian skripsi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya untuk menggali beberapa teori yang berhubungan dengan skripsi ini.

1. Pertama skripsi yang di tulis oleh Baiturrohman, pada tahun 2017 dengan judul *“Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur”* dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara, atau interview dan dokumentasi. Semua data tersebut di analisis menggunakan analisis deskriptif adapun hasil penelitian ini menunjukkan, pola pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan adalah yang pertama di bidang kesehatan yaitu posyandu, program penyuluhan kesehatan, kedua pola pemberdayaan di bidang pendidikan pengawasan bagi siswa penerima bantuan, pemberian bantuan tunai. Adapun dampak program keluarga harapan di desa wakan adalah yang pertama di bidang kesehatan seperti akses ibu hamil kepada sumberdaya kesehatan semakin tinggi dalam memeriksakan kehamilannya, anak juga mendapatkan asupan vitamin dan gizi. Dalam bidang pendidikan tingkat partisipatif anak

semakin tinggi dalam bersekolah, memutus rantai buta aksara dan melaksanakan wajib belajar 12 tahun.¹⁸

2. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Shella Yulia Rosalina, pada tahun 2018 dengan judul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Peningkatan Kemiskinan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”** dalam skripsi tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa metode pengumpulan data, yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya di analisis menggunakan reduksi data, penyajian dan kemudian verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan, proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yakni, Target sasaran calon penerima PKH, penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan, Proses Pertemuan awal dan validasi, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok Program Keluarga Harapan, Verifikasi Komitmen, Penangguhan dan pembatalan.¹⁹
3. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurdiana, pada tahun 2017 dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasan”** dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian

¹⁸ Baiturrohman “Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaruk Kabupaten Lombok Timur”, *Skripsi*, (Mataram: Universitas Negeri Mataram, 2017).

¹⁹ Shella Yulia Rosalina “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”, *Skripsi*, (Semarang, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2018).

kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan data dan analisis data dengan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, dapat dilihat dari proses sosialisasi hingga distribusi dana PKH yang dilakukan oleh pendamping. Keberhasilan sosialisasi akan terlihat apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, pendistribusian dana PKH kepada peserta Program Keluarga Harapan, dilakukan pula di sekolah-sekolah yang letaknya strategis yang mudah dijangkau oleh penerima PKH.²⁰

4. Keempat, skripsi yang ditulis oleh Cita Fauziatul Akmala, pada tahun 2017 dengan judul ***“Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung”*** dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan yang dipilih dengan *purposive sampling*, kemudian penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan dan teori penanggulangan kemiskinan, sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

²⁰ Nurdiana *“Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa” Skripsi*, (Makasar, Universitas Negri Makasar, 2017).

tentang Implementasi Program Keluarga Harapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Keranggan Kecamatan Keranggan Kabupaten Temanggung.²¹

Dari beberapa skripsi yang di jadikan kajian pustaka di atas, semua berkaitan dengan Program Keluarga Harapan dengan berbagai bidang dan bentuk pemberdayaan lain melalui Program Keluarga Harapan. Dalam hal ini tetaplah berbeda dari yang sebelumnya, karena dalam skripsi ini peneliti meneliti tentang Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan.

F. Kerangka Teori

Teori (Role Theory)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Teori adalah perpaduan dari berbagai macam teori, orientasi dan juga disiplin ilmu. Selain berasal dari psikologi, teori berawal dari sosiologi dan antropologi yang masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut menuatakan istilah “” diambil dari dunia teater. Seorang aktor dalam dunia teater harusbermain sebagai seorang tokoh tertentu

²¹Cita Faiziatul Akmala “*Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*” Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

juga diharapkan dapat berperilaku secara tertentu sesuai dengan tokoh yang di kan. Posisi aktor dalam teater itu yang kemudian dianalogikan sebagai posisi seseorang dalam masyarakat. Seorang aktor diharapkan tidak berdiri sendiri melainkan selalu dapat berhubungan dengan orang-orang lain atau aktor lain. Dari sudut pandang tersebutlah teori-teori dapat tersusun.²²

G. Sistematika pembahasan

Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan garis besar isi dari keseluruhan skripsi dalam bentuk sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar bagan, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam lima bab, yaitu:

BAB 1, berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Penegasan Iatilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB 2, berisi landasan teori tentang. Dalam bab ini berisi tentang Pendamping dalam pelaksanaan Program keluarga harapan.

²²Septiana Yuni Lestari, “ *Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan studikasuk di Dusun Warung Kepek Saptosari Gunungkidul*”, Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2019).

BAB 3, Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB 4, berisi tentang Metode Hasil Penelitian Tentang Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

BAB 5, berisi penutup, dalam bab ini akan di sajikan kesimpulan, saran-saran dan kata penutup, yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

Bagian ketiga dari skripsi ini merupakan bagian akhir, yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

Landasan Teori

A. Peran

1. Definisi peran

Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan fungsi ini dalam sistem sosial.²³

Terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengembangan. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.

²⁴

2. Jenis peran

Mengacu pada penjelasan diatas, dapat dibagi menjadi tiga jenis.

Menurut Soerjono Soekamto, adapun jenis-jenis adalah sebagai berikut²⁵

²³Lidya Agustina, Pengaruh Konflik, Ketidakjelasan dan kelebihan terhadap kepuasan kerja dan kinerja auditor (Penelitian pada kantor akuntan publik yang bermitra dengan kantor akuntan publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta, Jurnal akuntansi Vol. 1 No. 1 (Bandung; Universitas Kristen Maranatha) Hlm 42.

²⁴ Mutiawanthi, Tantangan "Role" yang dihadapi oleh mantan perawat IJ-EPA setelah kembali ke Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol.4 No.2 (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Al-Azhar Indonesia)Hlm 107.

²⁵Soerjono Soekamto, 2002, *Teori an*, Jakarta, Bumi Aksara hlm 235

a. Aktif

Aktif, adalah seseorang yang selalu aktif seutuhnya dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b. Partisipatif

Partisipatif adalah yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

c. Pasif

Pasif adalah suatu yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, pasif hanya dipakai sebagai symbol dalam kondisi tertentu di dalam masyarakat.

3. Strukur Peran

Secara umum, struktur dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu²⁶:

a. Formal

Formal merupakan yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam sekolah, kepala sekolah dan guru memiliki sebagai penyedia dan pendidik.

b. Informal

Informal merupakan yang tertutup, yaitu suatu yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat dipermukaan. Tujuan

²⁶ Dwi Narwoko, J, dan Suyanto, Bagong, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 247

informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

4. Fungsi Peran

Terdapat fungsi dalam kehidupan sehari-hari atau manfaatnya dalam masyarakat.²⁷ Adapun fungsi yaitu:

- a. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- b. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- c. Menghidupkan system pengendalian control.
- d. Nilai, Norma dan Pengetahuan.

Berdasarkan pendapat Narwoko dan Suyanto yang menyatakan bahwa terdapat fungsi dalam kehidupan sehari-hari atau manfaatnya dalam masyarakat.²⁸ Adapun fungsi yaitu:

- a. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat

Dalam kaitannya dengan penelitian ini dimana fungsi dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat adalah sebagai pemersatu prinsip.

- b. Memberi arah pada proses sosialisasi

Fungsi sebagai pemberi arah pada proses sosialisasi dalam hal membangun kemandirian masyarakat adalah penting adanya untuk dapat membantu masyarakat dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

²⁷ Dwi Narwoko, J, dan Suyanto, Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 160

²⁸ Dwi Narwoko, j, dan Suyanto, Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta Kencana, 2013), hlm 160

5. Teori peran

Teori secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing. Teori ini menjelaskan konsep dengan asumsi awal bahwa orang-orang merupakan bagian integral dari posisiposisi sosial tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku mereka sendiri dan atas perilaku-perilaku orang lain di sekitarnya. Ekspektasi selanjutnya dimaknai sebagai keyakinan-keyakinan seseorang terkait perilaku pribadinya sekaligus keyakinan-keyakinan seseorang yang diatribusikan atau dilekatkan kepada orang lain. Selain itu, juga dikatakan merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus pula hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudian terjadi melalui cara-cara tertentu dengan memainkan masing-masing yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilaku orang lain di lingkungannya.²⁹

Teori adalah perpaduan dari berbagai macam teori, orientasi dan juga disiplin ilmu. Selain berasal dari psikologi, teori berawal dari sosiologi dan antropologi yang masih tetap digunakan dalam sosiologi dan metropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut menuatakan istilah “” diambil dari dunia teater. Seorang aktor dalam dunia teater harus bermain sebagai

²⁹Made Aristia Prayudi, dkk, *Teori Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Ekonomi dan keuangan Vol. 2 No.4 tahun 2018 (Bali; Universitas Ganesa) Hlm 452.

seorang tokoh tertentu juga diharapkan dapat berperilaku secara tertentu sesuai dengan tokoh yang di kan. Posisi aktor dalam teater itu yang kemudian dianalogikan sebagai posisi seseorang dalam masyarakat. Seorang aktor diharapkan tidak berdiri sendiri melainkan selalu dapat berhubungan dengan orang-orang lain atau aktor lain. Dari sudut pandang tersebutlah teori-teori dapat tersusun.³⁰

6. Penyuluh atau fasilitator

Istilah penyuluh atau fasilitator itu sendiri, adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Lippit dan Rogers menyebutnya sebagai “agen perubahan (*Change agent*)”, yaitu seorang yang atas nama pemerintah atau lembaga atau pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Karena itu fasilitator haruslah profesional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut keperibadian, pengetahuan, sikap, dan ketrampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.³¹

Sedangkan seorang penyuluh atau fasilitator secara konvensional, hanya dibatasi pada kewajibannya untuk menyampaikan inovasi dan atau mempengaruhi penerima manfaat pemberdayaan melalui metode dan teknik-teknik tertentu sampai mereka (penerima manfaat) itu dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang

³⁰ Septiana Yuni Lestari, “ *Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan studikasuk di Dusun Warung Kepek Saptosari Gunungkidul*”, Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

³¹ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung; CV Alfabeta 2017) hlm. 139

disampaikan. Tetapi, dalam perkembangannya, penyuluh/fasilitator yang fungsinya hanya terbatas pada penyampaian inovasi dan juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan, diterima oleh penerima manfaatnya, tetapi fasilitator harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat yang diwakili oleh masyarakatnya, baik dalam hal penyampaian inovasi atau dalam kebijakan. Kebijakan yang harus diterima dan juga dilaksanakan oleh masyarakat, maupun untuk penyampaian atau umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah/lembaga pemberdayaan yang bersangkutan.³²

Sehubungan dengan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap penyuluh atau fasilitator seperti itu, Levin mengenalkannya adanya tiga macam penyuluh yang terdiri atas kegiatan-kegiatan :³³

1. Pencairan diri dengan masyarakat sasaran
2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan
3. Pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran.

B. Pemberdayaan

1. Definisi pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk pada suatu kemampuan orang, khususnya kelompok rentan/lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan juga kemampuan diantaranya, *Pertama* memenuhi kebutuhan dasarnya

³²Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*, (Bandung; CV Alfabeta 2017) hlm. 140

³³Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*, (Bandung; CV Alfabeta 2017) hlm. 140

sehingga mereka memiliki kebebasan, yang dimaksud bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, menyatakan bahwa masyarakat dikatakan bebas melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan, *kedua* menjangkau sumber-sumber produktif untuk mengemungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan juga memperoleh barang-barang atau jasa yang mereka perlukan, *ketiga* berpartisipasi dalam proses pembangunan dan juga keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.³⁴

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kuasa atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.³⁵

³⁴Edi Suharto, *membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pekerjaan sosial*, (Bandung; PT Refika Aditama 2014) hlm. 58.

³⁵Edi Suharto, *membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pekerjaan sosial*, (Bandung; PT Refika Aditama 2014) hlm. 59-60

2. Kelompok lemah dan ketidak berdayaan

Tujuan utama pemberdayaan ialah semakin memperkuat sistem kekuasaan pada masyarakat, dalam hal ini rentan terjadi pada kelompok lemah baik faktor internal maupun eksternal. Internal yang terjadi merupakan hasil pemikiran mereka sendiri, serta faktor eksternal terjadi berdasarkan adanya penindasan serta ketidakadilan yang diciptakan oleh struktur sosial. Ada konsep yang perlu di ketahui oleh kelompok masyarakat lemah.

- a. Kelompok masyarakat lemah secara structural kelas solias, persoalan gender, serta etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, meliputi lansia, anak-anak, dan remaja berkebutuhan khusus, gay dan lesbi, dan masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara individual, yaitu seseorang yang memiliki masalah pribadi atau keluarga. Ada beberapa kelompok yang didiskriminasikan oleh masyarakat, yaitu masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah, kelompok etnis yang minoritas, wanita, lansia. Keadaan dan prilaku mereka yang berbeda pada umumnya kemudian dianggap menjadi suatu yang menyimpang. Kebanyakan dari mereka bahkan kerap kali mendapatkan perilaku tidak baik oleh lingkungan mereka. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali

merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam spek-aspek kehidupan tertentu.³⁶

3. Indikator keberdayaan

Schuler, Hashemi dan Riley mengemukakan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indek pemberdayaan sebagai berikut :³⁷

- a. Kebebasan mobilitas : kemampuan seseorang untuk keluar rumah atau daerah dari tempat tinggalnya, seperti ke fasilitas-fasilitas yang sudah di sediakan, (pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, dan sebagainya) seorang individu yang mampu pergi sendirian tanpa adanya yang lain menjadikan tingkat mobilitas menjadi tinggi.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil : yaitu suatu kondisi dimana seseorang mampu membeli barang-barang kebutuhan pokok untuk sehari-hari (beras, minyak, bumbu dan lain-lain). Kebutuhan pribadi seperti, (sampo, bedak, sabun mandi, body lotion,) orang yang bisa memutuskan sesuatu tanpa pasangannya dan bisa membeli semua barang-barang kebutuhannya dengan uangnya sendiri maka individu tersebut dianggap mampu untuk mampu melakukan semua kegiatan tersebut.

³⁶Edi Suharto, *membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pekerjaan sosial*, (Bandung; PT Refika Aditama 2014) hlm. 60-61

³⁷Edi Suharto, *membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pekerjaan sosial*, (Bandung; PT Refika Aditama 2014) hlm. 63-64

- c. Kemampuan membeli komoditas besar : merupakan suatu kondisi dimana seseorang individu mampu membeli barang dan kebutuhan yang bersifat skunder, atau tersier seperti (lemari, tivi, kulkas, radio, pakaian, dan lain sebagainya,).
- d. Terlibat dengan pembuatan keputusan-keputusan tentang rumah tangga, mampu membuat keputusan secara individu atau bersama suami/istri tentang keputusan-keputusan yang ada dalam keluarga seperti memperbaiki rumah, pembelian hewan ternak, kredit usaha dan sebagainya.
- e. Kebebsan relative dari dominasi keluarga, responden diantaranya mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan keluarganya apakah ada yang mengambil uang, tanah, perhiasan, atau yang lainnya tanpa ijinnya, melarang untuk memiliki anak, serta tidak di ijinakan untuk bekerja diluar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik : mengetahui nama salah satu seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPR, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye protes-protes : seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil,

penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga : memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki posisi tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan utama dari konsep pemberdayaan adalah “masyarakat tidak dijadikan obyek dari proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari pembangunannya sendiri”. Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan baiknya pendekatan yang digunakan yaitu: Pertama, *targeted* artinya usaha yang harus dilakukan harus jelas arahnya kemana kepada siapa orang yang dituju dengan program yang telah disusun untuk mengatasi suatu permasalahan dan yang sesuai kebutuhan. Kedua, mengikutsertakan bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan tujuan agar bantuan yang diberikan berjalan efektif karena bentuk yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan atas usaha untuk meningkatkan potensi dirinya dan tingkat perekonomiannya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara individual masyarakat miskin sulit memecahkan masalahnya sendiri. Disamping itu kemitraan

usaha antar kelompok dengan kelompok yang lebih baik saling menguntungkan dan memajukan kelompok.³⁸

5. Penerima manfaat pemberdayaan masyarakat

Dalam banyak kepustakaan pemberdayaan masyarakat, selalu disebut adanya kelompok sasaran atau objek pemberdayaan masyarakat, yaitu : masyarakat, utamanya masyarakat kelas bawah (*kelompok akar rumput/grassroots, masyarakat yang termarjinalkan*). Pengertian itu memosisikan masyarakat dalam kedudukan yang lebih rendah dibanding para penentu kebijakan pembangunan, para fasilitator pemberdayaan masyarakat, dan pemangku kepentingan pembangunan yang lainnya, karena itu Mardikanto telah mengganti istilah sasaran penyuluhan menjadi penerima manfaat.³⁹

C. Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia .

1. Definisi PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan secara tunai berupa uang kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Orang yang menerima PKH diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam hal pendidikan dan kesehatan. Pada umumnya PKH memiliki tujuan guna meningkatkan akses pelayanan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk memperbaiki

³⁸Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Journal CIVISKS Vol. 1 No. 2 tahun 2011 (Semarang; Universitas PGRI Semarang) Hlm . 96

³⁹Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan masyarakat Dalam Prespektif KebijakanPublik* , (Bandung; CVAlvabeta 2017) hlm. 130

kualitas hidup suatu keluarga dengan adanya PKH, dapat menjadi solusi bagi suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek serta dapat memutus rantai kemiskinan dalam waktu lama. Sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan terpeliharanya tarap penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya.⁴⁰

Proses dari Program Keluarga Harapan tidak mempertimbangkan permasalahan yang dialami oleh setiap individu. Analisis masalah yang dilakukan tidak mengerucut pada kebutuhan sebenarnya, hal ini terlihat pada Program Keluarga Harapan, di mana program ini langsung bergerak pada bidang pendidikan dan kesehatan tanpa mengetahui permasalahan yang dialami individu. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa PKH ini telah memberikan kemudahan pada keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya, meskipun pada kenyataannya belum memberikan perubahan penghidupan kepada keluarga miskin tersebut. Sebagai salah satu contoh dalam upaya untuk menyekolahkan anak, keluarga miskin mampu untuk membayar biaya sekolah namun tidak mampu untuk memberikan uang jajan maupun menempuh jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal. Jika disebut sebagai program pengentasan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan model yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara. Meskipun terdapat pendamping dan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas

⁴⁰Syahputra Adisanjaya Suleman, Risna Resnawaty, *Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*, Journal PROSIDING KS: RISET & PKM Vol. 1 No. 24 tahun 2017 (Bandung; Universitas Padjajaran Bandung) Hlm. 90-91

masyarakat, Program ini bersifat top down, di mana program dilakukan langsung ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat tidak dilibatkan sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Padahal sebenarnya seberapapun miskinnya kondisi masyarakat tersebut, mereka memiliki kapasitas yang mampu dikembangkan. Sehingga selayaknya masyarakat tidak dipandang berada pada kondisi “gigi nol” atau tidak memiliki potensi apapun.⁴¹

2. Indikator Penerima PKH

Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Peserta PKH adalah RTSM yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu: memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan atau memiliki anak balita atau anak usia 5- 7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan atau memiliki anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.⁴²

⁴¹Syahputra Adisanjaya Suleman, Risna Resnawaty, *Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*, Journal PROSIDING KS: RISET & PKM Vol. 1 No. 24 tahun 2017 (Bandung; Universitas Padjajaran Bandung) Hlm . 91

⁴² Syahputra Adisanjaya Suleman, Risna Resnawaty, *Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*, Journal PROSIDING KS: RISET & PKM Vol. 1 No. 24 tahun 2017 (Bandung; Universitas Padjajaran Bandung) Hlm . 90

Table 1.1 Indeks Besaran Bantuan Yang diterima peserta PKH

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (dalam Rupiah)
1	Bantuan tetap	500.000
2	Bantuan ibu hamil dan menyusui	1.200.000
3	Bantuan anak usia di bawah enam (6) tahun	1.200.000
4	Bantuan peserta Pendidikan setara SD/MI atau sederajat	450.000
5	Bantuan peserta Pendidikan setara SMP/MTs atau sederajat	750.000
6	Bantuan peserta Pendidikan setara SMA/MA atau sederajat	1.000.000
7	Bantuan penyandang disabilitas berat	3.100.000
8	Bantuan lanjut usia 70 tahun ke atas	1.900.000

Sumber Kementerian Sosial 2016

Menurut Kementerian Sosial (2016), apabila peserta tidak memenuhi komitmennya maka berlaku beberapa ketentuan; pengurangan bantuan adalah 10% setiap bulannya sebelum penyaluran periode berikutnya, peserta tidak mendapat bantuan jika seluruh komponen anggota tidak memenuhi kewajiban selama 3 bulan berturut-turut, peserta PKH yang seluruh komponen anggotanya dalam 6 bulan berturut-turut tidak memenuhi komitmen maka disamping bantuan tidak diberikan, ia akan dikeluarkan. Bagi pendamping yang peserta PKH dampungannya tidak memenuhi kondisionalitas akan diberikan sanksi berupa mendapat teguran secara lisan maupun tertulis (SP-1 sampai SP3), dan penundaan pembayaran honorarium. Pendampingan komponen kesehatan dan pendidikan menurut Kementerian Sosial (2016) dilakukan dengan

ketentuan bahwa pendamping PKH berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan peserta PKH dampungannya, pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan dan pendidikan sampai pada sasaran.⁴³

3. Pendamping PKH

Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakterjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Keberhasilan PKH dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) dan pendamping. Menurut Departemen Sosial (2009), pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.⁴⁴

Berdasarkan pengertian yang dimaksud pendamping merupakan suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial. Ada beberapa

⁴³Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, *Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan*, Journal of Nonformal Education and Community Empowerment Vol. 1 No. 2 tahun 2017 (Semarang; Universitas Negeri Semarang) Hlm 164

⁴⁴Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, *Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan*, Journal of Nonformal Education and Community Empowerment Vol. 1 No. 2 tahun 2017 (Semarang; Universitas Negeri Semarang) Hlm 164

Undang-Undang yang secara langsung mengakui dan mengatur adanya keberadaan pekerja sosial. Diantaranya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 angka 4 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (14) yang dimaksud pendamping merupakan pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Menurut Keputusan Menteri Sosial No.10/HUK/2007, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerjaan sosial.⁴⁵

4. Persyaratan Umum Pendamping PKH

Adapun persyaratan umum sebagai pendamping PKH adalah tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI; siap dan bersedia bekerja penuh waktu serta ditempatkan pada wilayah sesuai dengan kebutuhan

⁴⁵Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, *Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan*, Journal of Nonformal Education and Community Empowerment Vol. 1 No. 2 tahun 2017 (Semarang; Universitas Negeri Semarang) Hlm 164

PKH; tidak berkedudukan sebagai pengurus, anggota dan atau berafiliasi partai politik; tidak pernah dan atau tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata; usia minimal 19 (sembilan belas) tahun maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada bulan April 2016; bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya; sehat jasmani dan rohani; lulusan perguruan tinggi atau sekolah yang program studinya terakreditasi bagi pendidikan sarjana, diploma, dan SMK; tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain; mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan office automation; bersedia menandatangani pakta integritas apabila terpilih menjadi pendamping dan operator PKH tahun 2016; serta mengikuti seluruh tahapan seleksi. Sedangkan persyaratan khusus untuk posisi pendamping PKH meliputi:⁴⁶

- 1) Pendidikan diploma IV/sarjana pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
 - a) mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan social,
 - b) memiliki pengalaman praktik pekerjaan sosial/pelayanan kesejahteraan sosial.
- 2) Pendidikan sarjana dan diploma di bidang ilmu-ilmu sosial terapan diutamakan;
 - a) mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan social,

⁴⁶Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, *Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan*, Journal of Nonformal Education and Community Empowerment Vol. 1 No. 2 tahun 2017 (Semarang; Universitas Negeri Semarang) Hlm 164.

- b) memiliki pengalaman praktik pekerjaan sosial/pelayanan kesejahteraan sosial.
- 3) Pendidikan sarjana atau diploma di bidang sosial diutamakan;
- a) mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial,
 - b) memiliki pengalaman praktik pekerjaan sosial/pelayanan kesejahteraan sosial.
- 4) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial/ keperawatan, diutamakan;
- a) mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
 - b) memiliki pengalaman praktik pekerjaan sosial/pelayanan kesejahteraan sosial.

5. Evaluasi

Kata evaluasi dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai istilah dari 'penilaian', yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati, oleh sebab itu, tidak mengherankan jika, tanpa kita sadari, setiap saat kita telah melakukan evaluasi, baik dirumah, diperjalanan, atau di tempat pekerjaan, bagaimana harus bersikap dengan orang yang sedang kita hadapi, ataupun menilai kegiatan yang dilakukan orang lain atau yang

kita kerjakan sendiri. Namapaknya dapat kita temukan beberapa hal yang merupakan pokok-pokok pengertian tentang evaluasi, yang mencakup:⁴⁷

- a. Evaluasi adalah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, gejala alam, atau sesuatu objek
- b. Membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita miliki atau kita ketahui.
- c. Melakukan penilaian atas segala sesuatu yang diamati, berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan.

Sehubungan dengan itu , Frutchey mengemukakan bahwa kegiatan evaluasi selalu mencakup kegiatan:

- 1) Observasi (pengamatan)
- 2) Membandingkan antara hasil pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan lebih dahulu
- 3) Pengambilan keputusan atau penilaian atas obyek yang diamati.

IAIN PURWOKERTO

⁴⁷Totok mardikanto, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*, (Bandung, Alfabeta, 2004) hlm 264 -265

BAB III

Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode sangat diperlukan. Metode penelitian adalah metode atau alat yang digunakan dalam penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dalam metode ilmiah.

B. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sugiono mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kecil, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁸

Dari penjelasan di atas bahwa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁴⁹

⁴⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 15.

⁴⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 6.

C. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dituju untuk diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun subjek yang akan di jadikan sumber data pada penelitian ini adalah orang-orang yang ber dan berpengetahuan yaitu:

1. Pendamping Program Keluarga Harapan.
2. Penerima Program Keluarga Harapan.

- a. Objek penelitian

Objek penelitian adalah suatu apapun yang akan dislidiki dalam kegiatan penelitian dan tidak terbatas. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pendamping dalam mendampingi para penerima program keluarga harapan.

D. Sumber Data

Sumber data yang utama adalah subjek utama dalam penelitian masalah diatas untuk memperoleh data-data yang konkrit. Adapun sumber data dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah narasumber yang dapat langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada yang berkaitan, pada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari dunia massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dengan mengkaji di tempat. Dari penelitian ini data skunder diperoleh melalui internet, jurnal dan buku yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti buat.

E. Metode pengumpulan data

1. Observasi

Menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁵⁰ Observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan observasi secara langsung data ketempat yang akan di teliti yaitu di Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.⁵¹

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

⁵⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, . . . , hlm. 310.

⁵¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 317.

pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang di wawancarai. Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, dan juga responden yang sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan cara seperti telepon.⁵²

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersifat terstruktur dengan harapan dapat memberikan keterangan real, maksimal dan mendalam mengenai penelitiannya.

3. Dokumentasi yang berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis, mencari data mengenai catatan-catatan atau dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh para pendamping PKH. Metode dokumentasi pada penelitian ini peneliti dapat mengumpulkan data-data yang tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengambil data kegiatan atau upaya para Pendamping Pkh.

⁵²Fatoni Abdurahman, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

F. Metode analisis data

Analisis data menurut Nasution adalah analisis yang telah dilalui, sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.⁵³

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. *Data reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁴

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah data di reduksi, maka selanjutnya adalah mendisplay data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵⁵

⁵³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, . . . , hlm. 336.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ... , hlm. 331.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, . . . hlm. 341.

c. *Conclusion Drawing (Verification)*

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan menumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁶

d. Penarikan kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan harus didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil kesimpulan atau inti dari beberapa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

IAIN PURWOKERTO

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, . . . , hlm. 345.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kartanegara

1. Kondisi wilayah



Sumber : Dokumentasi kecamatan

Letak geografis kecamatan Karatanegara sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Karangjambu, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaligondang, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan karangmoncol, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Karanganyar.

Kecamatan Kartanegara terdiri dari 11 Desa yakni: Desa Mergasana, Kartanegara, Kasih, Karang tengah, Condong Karang pucung, Karangasem, Adiarsa, Langkap, Darma, Kranglean.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Peserta PKH adalah masyarakat yang masuk kedalam 14 kriteria miskin yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan memiliki tanggungan ibu hamil, bayi usia di bawah 5 tahun, dan tanggungan anak sekolah sampai dengan Sekolah Lanjut Pertama (SLTA) di dalam satu rumah tangga.⁵⁷

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kertanegara dimulai sejak tahun 2011 dan masih berjalan sampai saat ini ditahun 2021 meskipun pada tahun ini Indonesia sedang mengalami wabah pandemi namun program ini tetap menjadi program yang penting dikarenakan pandemic mengakibatkan lemahnya perputaran uang sehingga beberapa jenis kelas sosial mengalami dalam kondisi yang rentan.

Khususnya yang menjadi fokus peneliti yaitu Program Keluarga Harapan yang berada di Kecamatan Kertanegara. Menurut data terbaru dan terupdate (Juli, 2021) PKH di Kecamatan Kertanegara memiliki

⁵⁷ Erna fidyatun,” Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kcamatan Brebes” *jurnal kesehatan masyarakat*”, Vol. 1, No.2, ... , hal. 26.

sejumlah 7 Pendamping dan 2431 peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah ini adalah data resmi dari pusat (baca: Kemensos/DTKS) tentu para aparat desa maupun si pendamping tersendiri tidak bisa asal memasukkan data apapun untuk menjadi peserta KPM kecuali dilakukan pendataan ulang dan si pendamping diberikan kewenangan untuk mendata para calon peserta yang baru.

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.⁵⁸ Program PKH dirancang dengan harapan dapat mensejahterakan rakyat yang kurang beruntung dalam hal ini adalah mereka yang berada dalam gari kemiskinan, sehingga engan adanya program ini memberikan sebuah motivasi bagi mereka agar dapat hidup layak dan sejahtera.

2. Pendamping PKH

Pendamping PKH di Kecamatan Kertanegara merupakan orang-orang yang dipilih dan dikontrak kerja oleh kementerian sosial untuk mendampingi terlaksananya PKH di tingkat kecamatan. Dengan adanya implementasi pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) dan adanya pendamping menjadi salah satu tingkat keberhasilan PKH.

⁵⁸ Khodziah Ianaini Kholif, dkk, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto" *jurnal Administrasi Publik*", Vol. 2, No. 4, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang 2017, hal. 711.

Adapun untuk Kecamatan Kertanegara sendiri yang menjadi fokus peneliti memiliki tujuh pendamping program dengan 2431 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tersebar di sebelas (11) desa yang terletak dalam administrasi Kecamatan Kertanegara.

a) Pendamping PKH

Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Keberhasilan PKH dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) dan pendamping. Pendampingan sosial merupakan suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan klain yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan segala sumber dan potensi guna memenuhi kebutuhan hidup, dan menyejahterakan akses klain dengan pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya merupakan pengertian pendamping sosial menurut departemen sosial.⁵⁹ Dari pengertian diatas dapat didefinisikan bahwasanya pendamping PKH merupakan suatu tugas yang diemban sebagai jembatan masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan dalam suatu pengembangan. Pendamping PKH juga sering disebut dengan sebutan pendamping sosial ataupun fasilitator sosial. Pendamping PKH atau bisa disebut sebagai pekerja sosial/ fasilitator

⁵⁹Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, *Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan*, Journal of Nonformal Education and Community Empowerment Vol. 1 No. 2 tahun 2017 (Semarang; Universitas Negeri Semarang) Hlm 164

sosial yang diperolehnya menjalankan sebagai pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program PKH melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan menjalankan tugas profesionalnya sebagai pekerja social.

disini oleh peneliti didefinisikan sebagai sistem sosial dengan mempertimbangkan suatu hak dan kewajiban kekuasaan serta tanggung jawab yang diemban olehnya agar dapat berkontribusi dengan orang lain dalam hal ini yakni orang yang membutuhkan fungsi ini dalam suatu sistem sosial.

Pentingnya pendamping bagi penerima pkh adalah untuk membantu RTSM mempunyai keterbatasan kemampuan dalam memperjuangkan haknya. Untuk itu dibutuhkan pendampingan, dalam membantu mendapatkan haknya yang patut mereka peroleh dari pkh. Selain itu pendamping membantu tugas-tugas UPPKH mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu yang cepat.

1) Tugas pokok pendamping PKH :

a) Tugas persiapan program.

Tugas persiapan program yaitu: kegiatan yang dilaksanakan sebelum pembayarannya pertama diberikan kepada peserta pkh, yang terdiri dari:

b) Sosialisasi program PKH tingkat kecamatan:

- 1.) Kordinasi dan sosialisasi kepada pihak kecamatan, kelurahan, RT,RW, dan tokoh masyarakat.
- 2.) Kordinasi dan sosialisasi kepada UPTD kesehatan dan UPTD pendidikan.
- 3.) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat umum.

c) Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.) Mempersiapkan pertemuan.
 - a.) Mengambil undangan calon penerima pkh dan data calon penerima PKH.
 - b.) Melakukan kordinasi dengan aparat setempat untuk menetapkan waktu menyiapkan fasilitas tempat pertemuan, dan sarana yang diperlukan.
 - c.) Membagikan undangan untuk calon peserta pkh, UPTD kesehatan, UPTD pendidikan, aparat setempat, dan tokoh masyarakat.
 - d.) Membuat daftar hadir pertemuan.
- 2.) Menyelenggarakan pertemuan.
 - a.) Memastikan peserta pertemuan hadir.
 - b.) Memepersilahkan peserta untuk mengisi daftar hadir.
 - c.) Mencatat peserta pertemuan yang tidak hadir.

- d.) Memperhatikan peserta pertemuan yang bukan calon peserta PKH
 - e.) Jika peserta PKH diwakilkan kehadirannya, maka wakil peserta tersebut tidak dapat menandatangani formulir validasi, karena formulir harus ditandatangani peserta pkh.
 - f.) Pendamping dapat menginformasikan kepada wakil dari peserta PKH untuk dapat meninggalkan pertemuan dan menawarkan pertemuan dilain waktu.
 - g.) Melakukan validasi yaitu proses pengecekan data calon peserta PKH kedalam sistem aplikasi yang telah disiapkan.
 - h.) Membagi dan membentuk kelompok peserta PKH yang beranggotakan 15-30 peserta PKH, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - i.) Mengidentifikasi penerima bantuan PKH berdasarkan kedekatan tempat tinggal.
 - j.) Jika memungkinkan mengidentifikasi peserta PKH berdasarkan bidang kesehatan dan pendidikan.
- 3.) Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok peserta PKH :
- a. Menjelaskan peran ketua kelompok secara jelas.
 - b. Meminta masing-masing kelompok mengidentifikasi 1 orang atau lebih yang mewakili kelompok tersebut

sebagai ketua (diutamakan yang dapat membaca dan menulis).

4.) Tindak lanjut pertemuan awal

- a.) Mengunjungi calon peserta yang tidak hadir pada pertemuan awal untuk melakukan validasi.
- b.) Membuat laporan hasil pertemuan kepada uppkh kabupaten atau kota selambat-lambatnya satu minggu setelah pertemuan berakhir dengan melampirkan daftar hadir peserta pkh, daftar hadir undangan, dan catatan kegiatan pertemuan.
- c.) Mendampingi kunjungan pertama peserta pkh ke puskesmas, posyandu, dan jaringan kesehatan lainnya.
- d.) Mendampingi kunjungan kesekolah yang akan menerima peserta didik peserta pkh.

2) Tugas rutin pendamping PKH

Tugas rutin pendamping pkh adalah tugas keseharian yang harus dilakukan secara insentif. Tugas rutin ini dialokasikan dalam waktu empat hari kerja antara hari senin s\&d kamis.

- a) Tugas rutin pendamping meliputi: melakukan pemutakhiran data pemutakhiran dilakukan apabila:
 - 1) Perubahan struktur keluarga atau penerima bantuan pkh, baik dari segi penambahan atau pengurangan tanggungan maupun perubahan status pendidikan.

b) Pemutakhiran dilakukan dengan cara:

- 1) Mengisi form pemutakhiran yang telah disediakan dengan menyertakan bukti yang terkait dengan perubahan.
- 2) Melaporkan ke UPPKH kabupaten atau kota untuk dikirim kepusat.
- 3) Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan, pendamping menerima pengaduan, menyelesaikan maupun meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi.
- 4) Mengunjungi rumah peserta PKH jika dalam pertemuan kelompok ada peserta PKH yang tidak bisa datang dan tidak dapat memenuhi komitmen, maka pendamping wajib melakukan kunjungan kerumah peserta pkh.
- 5) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tugas koordinasi dengan aparat setempat dilakukan pendamping, ketika akan turun pencairan bantuan, pertemuan kelompok dan pemberian sanksi kepada peserta pkh tidak memenuhi komitmen.
- 6) Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta pkh. Pertemuan rutin memiliki beberapa fungsi yang melibatkan pendamping dan ibu ketua kelompok penerima secara aktif, yaitu:

- a. Sebagai media untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, yaitu upaya internalisasi program yang diberikan kepada peserta PKH.
 - b. Sebagai upaya mendeteksi masalah-masalah yang ada dilapangan sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan koridor yang telah disepakati bersama maupun dilaporkan ke UPPKH daerah untuk ditindak lanjuti.
 - c. Sebagai ajang curah pendapat bagi ibu peserta PKH. Pertemuan ini dilakukan sebulan sekali sesuai jadwal yang telah disepakati antara pendamping dan pemimpin kelompok peserta PKH.
 - d. Memperbarui informasi perkembangan dan pencapaian program.
 - e. Melakukan pemutakhiran data peserta pkh dan validasi atas perubahan tersebut yang di dukung oleh fakta-fakta yang ada.
 - f. Menerima dan menggali keluhan yang menjadi permasalahan yang dihadapi peserta PKH.
 - g. Memberi motivasi kepada peserta agar tetap aktif dalam menjalankan tugasnya memenuhi komitmen.
- 7) Melakukan temu kunjungan dengan petugas kesehatan dan pendidikan dilikasi pelayanan. Kegiatan temu kunjungan dilaksanakan minimal sebulan sekali dan bertempat di unit

pelayanan (sekolah atau puskesmas, yang dipilih secara rotasi atau berdasar kemudahan akses) oleh pendamping dan penyedia layanan terkait (pendidikan atau kesehatan) di wilayah kecamatan masing-masing.

- 8) Memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan komitmen. Pemberian motivasi dilakukan kepada peserta PKH dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Motivasi lebih ditekankan kepada peserta PKH yang rentan untuk mengabaikan komitmen agar tidak terkena sanksi.
- 9) Melakukan upaya yang sinergi antara pendamping PKH dengan pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam pengisian formulir verifikasi. Pendamping melakukan pengecekan pelaksanaan kewajiban peserta PKH dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pendamping PKH menyampaikan dan mengisi form verifikasi yang disahkan oleh petugas pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai bukti kehadiran anak, ibu hamil, dan anak peserta didik.
- 10) Melakukan pencatatan dan pelaporan
 - a. Pencatatan setiap aspek kegiatan dalam PKH perlu dicatat, dilaporkan dan ditindaklanjuti agar proses

pengendalian, keberlangsungan dan pengembangan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Bentuk pencatatan disesuaikan dengan formulir atau format yang telah ditentukan pencatatan meliputi: Catatan harian pendamping dan catatan mingguan atau Checklist kegiatan pendamping (CKP)

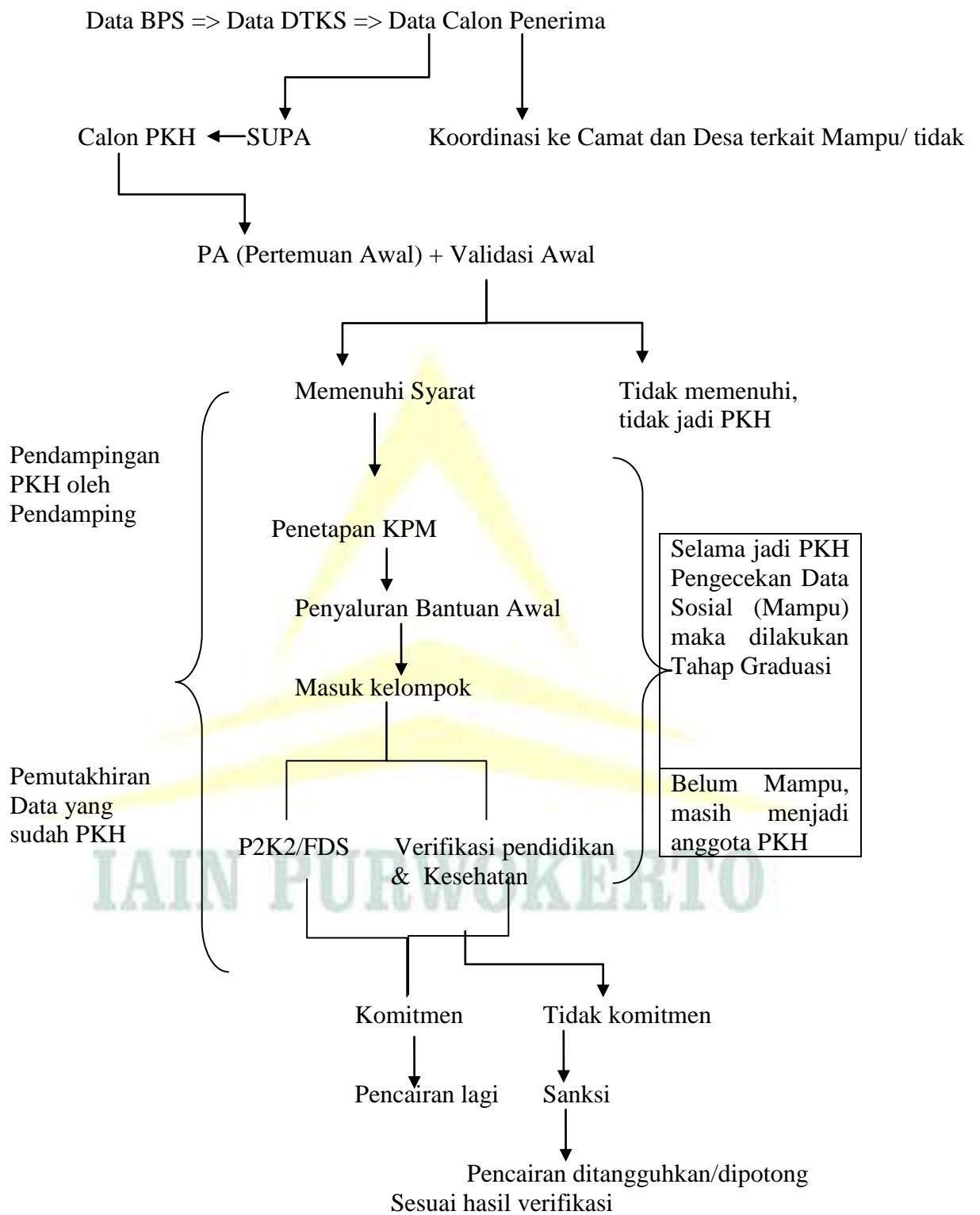
- b. Laporan yang dibuat meliputi laporan bulanan yang terbagi menjadi 5 bagian yaitu:
 1. bagian a berisi tentang pendahuluan
 2. bagian b berisi tentang pelaksanaan kegiatan.
 3. bagian c berisi tentang kesimpulan.
 4. bagian d berisi tentang saran
 5. bagian e berisi tentang penutup.
- c. Tugas pendamping dalam proses penyaluran bantuan pendamping melakukan kordinasi dan persiapan penyaluran bantuan. Pada saat penyaluran bantuan, pendamping melakukan kegiatan sesuai dengan mekanisme dan daftar kontrol. Persiapan yang harus dilakukan pendamping meliputi:
 - 1) Menyerahkan kartu kepeserta PKH kepada ibu penerima manfaat yang di dampinginya.

- 2) Pergi ke kantor pos atau kantor bank untuk meminta jadwal penyaluran bantuan dan mendapat peserta PKH yang merupakan kelompok binaannya.
- 3) Menginfoemaskan kepada ketua kelompok mengenai jadwal dan memastikan bahwa penyaluran bantuan diterima oleh orang yang tepat pada waktu yang telah ditentukan.⁶⁰



IAIN PURWOKERTO

⁶⁰ Emmy Widayanti dkk, *Buku Kerja Pendamping PKH*, 2013, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Hal. 15-30.



Sumber penggambaran singkat yang diberikan oleh Pak Dimas.

3. Peran Pendamping PKH

Proses awal pendamping sebelum menjadi pendamping adalah mengikuti pendaftaran online dan melakukan beberapa seleksi dan akhirnya lolos terpilih menjadi pendamping PKH, berikut adalah peran secara khusus dari pendamping PKH

- a. Setelah pendamping sudah menjadi pendamping maka akan diberi data calon penerima PKH dan data itu adalah data yang di peroleh dari BPS (badan pusat statistik) lalu data DTKS atau calon peserta di kordinasikan ke camat dan desa untuk mencari data terkait anggota keluarga yang mampu dan tidak mampu setelah di tentukan peserta pkh maka pendamping memberikan supa (surat panggilan) kepada peserta PKH .
- b. Setelah penetapan peserta pkh maka pendamping akan melakukan pertemuan awal dan validasi data atau pengecekan data untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk menjadi peserta pkh atau tidak oleh pendamping
- c. Penetapan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan pengelompokan peserta pkh untuk menentukan kpm layak atau tidak menjadi peserta pkh dan ketika sudah menjadi peserta pkh maka dilakukan pencairan pertama. ketika kpm itu sudah mengikuti pencairan pertama maka sudah menjadi peserta pkh maka dari itu ada kewajiban-kewajiban kpm yang harus dipenuhi tidak hanya menerima hak uang tetapi ada kewajibannya seperti anak balita harus posyandu dan ibu hamil juga

posyandu dan anak sekolah harus sekolah . dan ibunya harus wajib mengikuti P2K2 atau kumpulan kelompok.

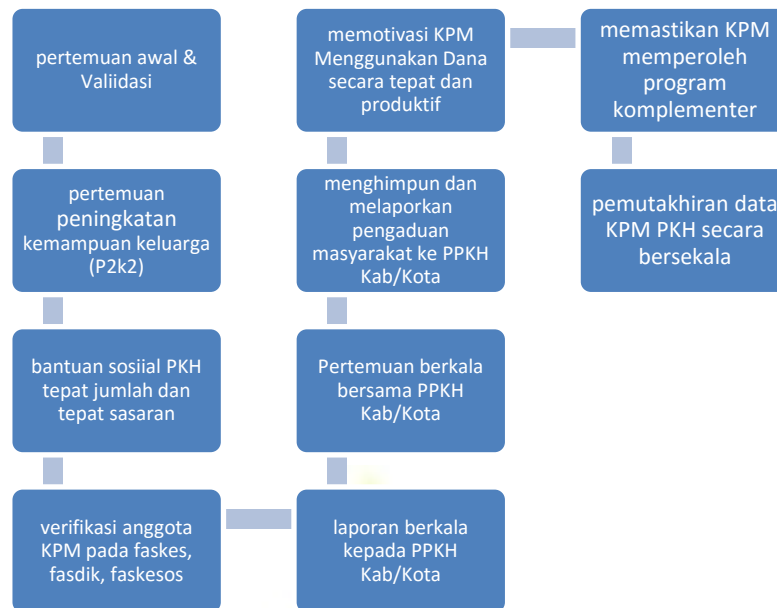
- d. Verifikasi pendidikan dan kesehatan pendamping melakukan verifikasi data ke sekolah terkait presentasi anak yang menerima pkh apakah kehadirannya memenuhi syarat atau tidak dan pendamping juga melakukan verifikasi ke bidan terkait ibu hamil dan balita apakah sudah melakukan posyandu atau tidak . jika ditemukan peserta pkh terkait anak sekolah dan balita atau ibu hamil melanggar peraturan yang sudah ditetapkan atau tidak komitmen maka akan dikenakan sanksi dengan pencairan ditangguhkan atau dipotong pusat sesuai hasil verifikasi.
- e. Proses graduasi ketika ada kpm yang dianggap mampu misalkan dilihat dari segi ekonominya yang meningkat dari pendamping melakukan pendekatan terhadap kpm supaya mau untuk keluar dari pkh, graduasi itu dibagi menjadi dua yaitu graduasi alami dan graduasi mandiri. Graduasi alami adalah yang komponennya habis sedangkan graduasi mandiri itu kpm yang sudah mampu.
- f. Pemutakhiran data adalah apabila ada data kpm yang update terbaru terkait anak sekolah yaitu ketika lulus sekolah atau naik kejenjang yang lebih tinggi dan ketika ibu hamil sudah melahirkan dan balita ketika sudah tidak balita lagi.

Implementasi Pendamping PKH, pendamping PKH merupakan fasilitator dari salah satu program pemerintah dalam upaya mengentaskan

kemiskinan di Indonesia. Merujuk pada teori yang sudah disebutkan sebelumnya pendamping PKH di sini harus ber aktif dan partisipatif dalam mengemban tugasnya. Tugas seorang pendamping PKH secara umum terbagi dalam dua kategori yakni tugas persiapan program dan tugas rutin yang akan dilaksanakan oleh pendamping sosial PKH di dalam wilayahnya masing-masing. dan yang selanjutnya adalah tugas persiapan program adalah tugas awal seorang pendamping yakni menyelenggarakan pertemuan awal, sosialisasi program kepada calon KPM dan masyarakat umum, membentuk kelompok peserta PKH, melaksanakan validasi data calon KPM dan juga mengentry hasil validasi dta ke sisystem e-PKH, selanjutnya melaksanakan koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Dimas Rangga salah satu pendamping PKH di Kecamatan Kartanegara dari hasil wawancara peneliti dengan beliau, beliau mengatakan :

Tugas pendamping banyak mendampingi KPM dan pembaharuan data KPM pemutakhiran pengecekan dilapangan terus pemberian materi pembelajaran FDS ketika perkumpulan ngecek anak disekolah, ferifikasi.



dan fungsi pendamping dalam pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai objek dan subjek pemberdayaan, yakni melakukan pemberdayaan masyarakat terkhusus pada kelompok rentan dan lemah agar mereka mempunyai sebuah kekuatan dalam memnuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari jeratan kemiskinan, kelaparan, kebodhan dan bebas dari kesakitan. Selanjutnya menjangkau sumber produktif msyarakat supaya mereka dapat meningkatkan pendapatanya serta memperoleh kebutuhan hidup yang mereka butuhkan serta ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan keputsan-keputusan mereka.

Demi mewujudkan keberhasilan pemberdayaan ini masyarakat yang mengikuti program dari pemerintah ini yakni KPM program PKH

harus ikut ambil andil ber aktif dalam setiap kegiatan yang telah ditawarkan oleh pekerja sosial atau pendamping PKH yang bertugas mendampingi mereka.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota penerima PKH mereka sebagai anggota PKH wajib aktif dalam mengikuti setiap program dari pendamping PKH hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Badriah ia mengatakan :

*“Ya ikut aktif seperti kumpulan saya berangkat dan kalo ada kegiatan saya selalu berangkat . dan melaksanakan kewajiban atas bantuan yang saya terima yang berbentuk uang saya gunakan sesuai apa yang telah pendamping jelaskan kepada saya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharaian saya seperti membeli kebutuhan pokok seperti beras, lauk pauk, susu dan juga buat berobat”.*⁶¹

Dengan demikian proses pemberdayaan masyarakat akan berjalan sesuai kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat kemudian pendamping disini adalah :

1. Membangun kemampuan masyarakat dalam merumuskan persoalannya sendiri, mewujudkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan sendiri, dan menentukan masa depannya sendiri.
2. Mengubah prilaku keluarga peserta PKH kearah yang lebih baik, hal ini bisa berupa pemberian motivasi dan pembelajaran dapat dilakukan pada saat pertemuan peserta PKH.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Siti Badriah salah satu peserta KPM di Desa Condong

3. Menciptakan masyarakat yang terorganisir bertujuan untuk mengalang potensi kelompok, mengakses sumber daya, dan mengembangkan jaringan kerja.

Prose pendampingan harus dilaksanakan secara kontinew yakni: Proses pembelajaran terus-menerus bagi KPM PKH dengan tujuan kemandirian keluarga dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya, Inisiatif pendamping akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya akan berhenti, pendamping akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.

Pendamping yang terakhir yakni melakukan evaluasi dari kegiatan-kegiatan atau program yang telah dijalankan bersama. Evaluasi merupakan proses pengidentifikasian keberhasilanataupun kegagalan dari perencanaan program, dengan kata lain evaluasi dapat juga diartikan sebagai sebuah proses guna mengetahui berhasil tidaknya suatu program yang telah dilaksanakan, mencari tahu penyebab keberhasilan dan kegagalan dari suatu program, serta bagaimana tindak lanjutnya. Dalam hal ini evaluasi memiliki beberapa tujuan antara lain:

- a. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
- b. Megukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
- c. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang kemungkinan bisa terjadi diluar rencana.

Evaluasi sangatlah diperlukan di sini karena untuk mengetahui kemajuan dalam melaksanagn suatu progam, mengumpulkan informasi

untuk dijadikan sebagai dalam penyempurnaan, serta melakukan pengkoreksia terhadap kesalahan yang telah dilakukan.

Dari hasil observasi yang dilakukan pendamping pkh di kecamatan kartanegara telah menjalankan evalausi sebagaimana mestinya hal ini dijumpai penulis pada saat pertemuan kelompok dan juga setelah pertemuan kelompok ada evaluasi tersendiri yang dilkukan oleh para pendamping. Evaluasi yang dilaksanakan pendamping pkh di kecamatan kartanegara antara lain :

- 1) Kegiatan evaluasi sebelum melaksanakan program kerja dengan cara melakukan peneliaaan terhadap desain program yang telah dibuat dan disepakati. Dengan demikian, evaluasi yang dilaksanakan pada tahap ini memungkinkan dapat dilakukan perbaikan program sebelum dilaksanakan. Dalam kata lain juga melakukan pergantian desain program yang tealah didesain sebelumnya yang di nilai tidak layak atau tidak efisien untuk dilaksanakan.
- 2) Evaluasi pada saat program berjalan, dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan, kelebihan, dan kelemahannya termasuk penggunaan teknik dan metode pelaksanaannya. Evaluasi pada tahap ini sangat berguna untuk mengetahui kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan sedini mungkin, sehingga dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan program. Dalam hal ini, perbaikan dan penyempurnaan dapat dilakukan sebelum kesalahan berlanjut semakin jauh.

3) Evaluasi setelah program selesai, dimaksudkan untuk melihat apakah hasil program yang diperoleh sesuai tujuan yang telah dirumuskan dalam desain program atau tidak. Hasil evaluasi pada tahap ini dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan keseluruhan program. Di samping itu, juga dapat digunakan untuk memberikan bahan masukan bagi perencana dan pelaksana program pemberdayaan yang sejenis pada masa yang akan datang. Selain itu, evaluasi pada akhir program juga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan akhir dari pelaksanaan program dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang bersangkutan.

Para pendamping PKH selain menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan pedoman menjadi Pendamping PKH, para pendamping PKH juga memiliki peran memastikan jalannya program tidak hanya sebatas berangkat kerja lalu ngopi dan pulang kerumah lagi namun harus benar-benar mengetahui betul-betul bagaimana perkembangan peserta dampungannya dari berbagai aspek yang menjadi faktor indikasi keberhasilan program PKH yang menurut peneliti sangatlah tidak kondusif apabila seperti yang ditemukan di Kecamatan Kartanegara yaitu satu orang pendamping mendampingi sekitar 300- 500.

Angka tersebut merupakan angka yang besar dan tentunya pendamping memiliki peran yang sangat vital dan perlu adanya kerja sama antara penerima KPM dengan Pendamping guna mencapai tujuan dari Program PKH ini.

4. Peserta dan Pendamping PKH di Kecamatan Kartanegara

1. Peserta PKH

Menurut salah satu pendamping yaitu Pak Dimas seiring dengan perkembangan dan pemutakhiran data yang sedang dilakukan saat ini untuk Kecamatan Kertanegara memiliki 7 Pendamping PKH dengan 2431 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun datanya ada di tabel dibawah ini:

Tabel 1.II
Data Tahap Ke Tiga PKH Kecamatan Kertanegara Tahun 2020

N O.	Nama Desa/Pendamping	Jumlah Bumil	Jumlah Usia Din	Jumlah Anak SD	Jumlah Anak SMP	Jumlah anak SMA	Jumlah Lansia	Jumlah Disabilitas	Jumlah KPM
1.	Desa Adiarsa/ Rini Suprpti, S.Pd	0	28	76	54	60	39	0	164
2.	Desa Condong/ Teguh Nur Fajar, S.E	0	37	57	24	35	19	0	97
3.	Desa Darma/ Rini Suprpti, S.Pd.	0	40	60	40	23	17	0	120
4.	Desa Karang Tengah/ Teguh Nur Fajar, S.E	1	76	152	99	81	36	2	236

5.	Desa Karangasem/ Ani Kustiani, S.H.I	2	109	215	126	83	55	2	333
6.	Desa Karang Pucung/ Nurcholis	0	26	63	49	35	33	2	123
7.	Desa Kasih/ Dimas Rangga Hadi Saputra, S.Pd.	3	88	118	76	45	39	1	223
8.	Desa Kertangeara/. Nurcholis	0	66	124	081	69	36	2	215
9.	Desa Krangean/ Layla Ramadhan i Nurfasani/	1	124	246	113	56	56	2	383
	Rini Suprpti, S.Pd.	0	30	48	27	28	22	1	95
10	Desa Langkap/ Triana Rimbawati , AM.KEB	8	121	234	136	55	47	1	369
11	Desa Mergasana /Dimas Rangga Hadi Saputra.	1	19	45	20	11	6	0	63

Sumber : Diperoleh dari penampang Pak Dimas

Dan agar lebih mudah memahaminya lihat tabel dibawah ini, berikut merupakan pola yang mudah dipahami dari rincian para peserta dan criteria penerima KPM di Kecamatan Kertanegara

Tabel 1.III
Data Peserta PKH Kecamatan Kertanegara Tahun 2020

No	Kriteria Peserta PKH di Kecamatan Kertanegara (11 Desa)	Jumlah Peserta PKH
1	Bantuan ibu hamil dan menyusui	16
2	Bantuan anak usia di bawah enam (6) tahun	764
3	Bantuan peserta Pendidikan setara SD/MI atau sederajat	1438
4	Bantuan peserta Pendidikan setara SMP/MTs atau sederaja	845
5	Bantuan peserta Pendidikan setara SMA/MA atau sederajat	581
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	13
7	Bantuan lanjut usia	405

Menurut salah satu pendamping yaitu Pak Dimas menyebutkan seiring dengan perkembangan dan pemutakhiran data yang sedang dilakukan saat ini, untuk Kecamatan Kertanegara memiliki 7 Pendamping PKH dengan 2431 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun untuk saat ini satu orang pendamping mendampingi KPM yang jumlahnya kisaran 300-500 KPM.

2. Pendamping juga menuturkan bahwa untuk Kecamatan Kertanegara sejak dari tahun 2014- 2016 tidak ada penambahan data KPM, namun seiring tahun penerima menjadi sedikit karena terjadi graduasi baik

yang terjadi secara alami atau graduasi mampu. Pak Dimas juga berpendapat bahwa banyaknya KPM yang akhirnya lolos menjadi graduasi mampu dan pastinya selama program ini terus berjalan maka setiap tahunnya perlu dilakukan pemutkahiran data dan menambah jumlah peserta KPM guna menekan angka kemiskinan dan menaikkan level ekonomi para peserta KPM.

C. Pendamping PKH dan peserta KPM dalam Bingkai Teori Peran.

Secara jelas dalam Program Keluarga Harapan terdapat dua subjek yang berbeda dan memiliki jenis yang berbeda pula, namun untuk mencapai keberhasilan program tentu kedua subjek ini harus memposisikan dirinya pada posisi yang sebagaimana telah diatur yaitu; Pendamping sebagai peran aktif, dan peserta KPM sebagai peran yang berpartisipasi.

Pendamping haruslah memulai terlebih dahulu guna menyampaikan maksud dari program ini dan penerima KPM juga tentu dituntut menjadi peran yang partisipatif sesuai yang arahan dan bimbingan dari Pendamping PKH.

Namun jika dilihat dari struktur peran para pendamping PKH lebih banyak bergulat dan aktif pada struktur formal karena ia sebatas hanya menjalankan tugas dan fungsi serta melakukan segala sesuatunya sesuai dengan pedoman yang telah diarahkan. Namun sebaliknya struktur peran yang informal yang mungkin belum dilakukan oleh para pendamping mengenai sosialisasi ataupun motivasi dalam menjalankan sebuah program.

Lebih lanjut yang dimaksud dari pernyataan diatas adalah Pendamping hanya sebatas melakukan pekerjaannya saja mengatur, mengawasi dan

mengevaluasi tanpa adanya pemberian dorongan mindset yang ditujukan kepada penerima KPM. Memang bisa dikatakan bahwa dengan memberikan bantuan tunai yang diberikan kepada sejumlah masyarakat yang sesuai kategori sangatlah membantu sekali apalagi jika dilihat sekarang sedang wabah pandemic corona.

Seorang Pendamping PKH tentu diharapkan memiliki gairah yang lebih dalam mengajak bagaimana masyarakat melakukan suatu perubahan. Melalui penggunaan metode dan caranya masing masing sesuai kemampuan para pendamping pendamping diharapkan melakukan fungsi dan struktur yang lebih diluar formal.

Memaksimalkan hubungan antar subjek yaitu Pendamping dengan peserta KPM adalah jalan utama berhasilnya program ini dengan seperti yang dikatakan Pak Dimas bahwa sudah banyak keluarga yang (mentas) dari PKH karena merasa sudah mampu dan tentunya para pendamping tentu akan terus menerima calon-calon data KPM baru yang diharapkan mampu sedikit mengentaskan kemiskinan di wilayah Kecamatan Kartanegara.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, didapatkan bahwa Kecamatan Kertanegara saat ini dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki 7 pendamping dan 2431 KPM yang tersebar di 11 desa di Kecamatan Kertanegara, para pendamping sudah berusaha melakukan fungsi dan tugas mereka sesuai dari pedoman yang diarahkan.

Keberhasilan dari Program PKH tentu merupakan kerja sama kolaborasi antara Pendamping PKH dengan penerima KPM, dengan sebagaimana peran yang sudah dijelaskan yaitu adanya peran aktif, partisipatif disertai dorongan yang kuat dari pada pendamping bekerja baik dengan melalui struktur formal maupun informal yang tentu dapat membangun kesadaran dan meningkatkan produktifitas para peserta KPM karena dengan mereka tercantum dalam DTKS seharusnya mereka merasa sedikit terbantu dan tentu benda materi yang lain bisa diarahkan dan digunakan untuk hal-hal yang menunjang terciptanya kesejahteraan ekonomi, kemakmuran kesehatan dan faktor indikasi keberhasilan program yang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyusun memberikansaran Saran-saran yang peneliti berikan disini hanya sebagai sumbangan pemikiran yang dapat untuk dipertimbangkan dari pihak Pendamping PKHKecamatan Kertanegaradan Peserta PKH. Saran-saran tersebut :

1. Pendamping PKH

- a. Dari keberhasilan yang telah dicapai semoga dapat dijadikan landasan guna meningkatkan kualitas program kerja selanjutnya.
- b. Pendamping PKH harus menjaga keharmonisan dengan Peserta PKH, dan menjadi garda terdepan terkait permasalahan yang dialami para peserta.
- c. Terus mengedukasi peserta PKH agar mereka dapat bebas dari rantai kemiskinan.
- d. Pendamping diharapkan mempunyai program tertentu yang berpengaruh untuk mensejahterakan pesertanya diluar dari program yang ditentukan oleh pemerintah.

2. Peserta PKH

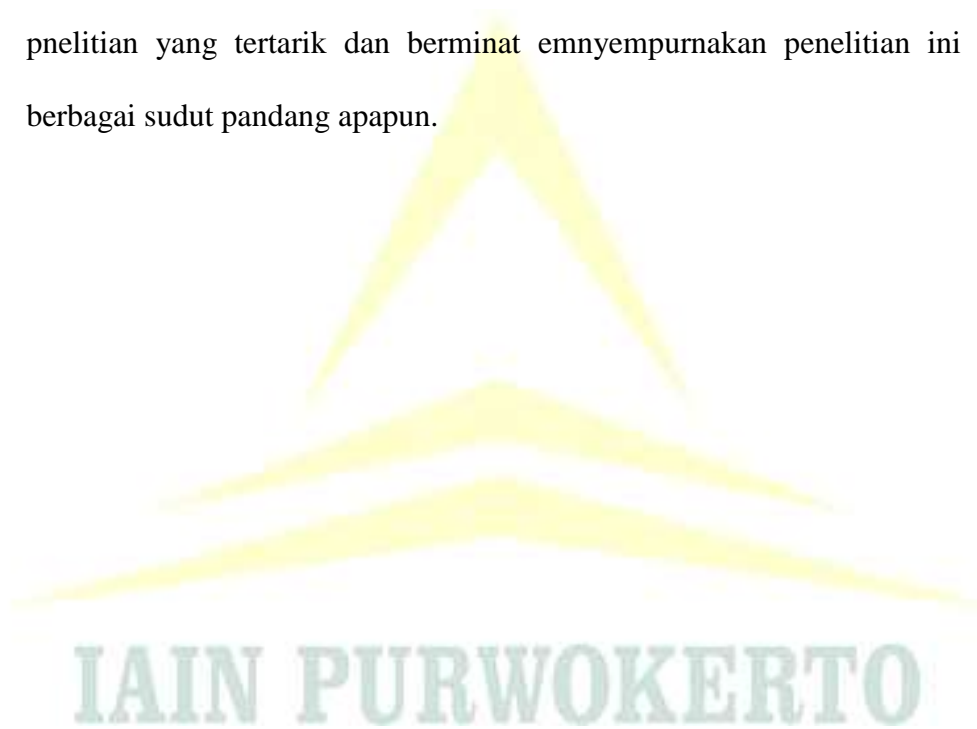
- a. Peserta PKH diharapkan bisa memanfaatkan uang bantuan dari program ini sebagaimana mestinya.
- b. Dapat mempertanggung jawabkan kewajiban sebagai peserta PKH.
- c. Peserta harus bisa inovatif sehingga perlahan-lahan bebas dari kemiskinan dan tidak selalu bergantung kepada bantuan PKH.

C. Penutup

Penyusun menyadari bahwa sedikit karya yang penyusun hasilkan dari penelitian yang berjudul “ Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga” ini masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan waktu, jarak,

tenaga, serta kemampuan dalam memaksimalkan penelitian, membuat skripsi ini masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu, kritik dan saran membangun yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penulis butuhkan guna memperbaiki kekurangan yang belum penulis sempurnakan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat dalam penelitian ini. Penulis berharap akan ada penelitian yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut pandang apapun.



DAFTAR PUSTAKA

- Baiturrohman. 2017 “Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaruk Kabupaten Lombok Timur”, *Skripsi*, (Mataram: UniversitasNegriMataram,)
- Cita Faiziatul Akmla. 2017. “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung” *Skripsi*, (Yogyakarta, Universitas Islam NegriSunanKalijaga Yogyakarta,)
- Darastrilatifah. 2017. “Pendamping Bagi Orang Dengan HIV/AIDS” *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*”, Vol. 2, No 3, (Bandung: UniversitasPadjajaran,)
- Dwi Narwoko, Suyanto bagong. 2013. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana
- Ekardo Apando. 2014 “Efektifitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir Kabupaten Pesisir Selatan”, *Jurnal lmu Sosial Mamangan*, Vol. 3, No 1, (Sumatra Barat: PGRI,)
- Eliza NurFitriani, 2013. ” Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan” *jurnal kebijakan dan administrasi public*,” Vol. 17, No. 02, (Stikes Bhakti Husada Bengkulu)
- Erna Fidyatun. 2012. “Evaluasi Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan di Kabupaten Brebes Tahun 2011”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* ,Vol. 1, No 2, (Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro,)
- Evi Rahmawati,2017. “Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan” *Jurnalof Nonformal Education and Empowerment*”, Vol. 1, No 2, (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negri Semarang,)
- Fatoni Abdurahman, 2014.*Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. RinekaCipta
- Habibulloh, 2011. “Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang”, *Jurnal informasi*, Vol. 16, No 02, (Jawa Barat: Karawang.)
- Khodziah Ianaini Kholif.2017. “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong

Kabupaten Mojokerto”*jurnal Administrasi Publik*”, Vol. 2, No.4 2017, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Lidya Agustina,2009 *Pengaruh Konflik, ketidakjelasan dan kelebihan terhadap kepuasan kerja dan kinerja auditor (Penelitian pada kantor akuntanpublik yang bermitra dengan kantor akuntanpublik Big Four di Wilayah DKI Jakarta*, Jurnalakutansi Vol. 1 No. 1 (Bandung; Universitas Kristen Maranantha)

Made Aristia Prayudi,2018. *Teori Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa* , Journals Ekonomi dan keuangan Vol. 2 No.4 tahun (Bali; Universitas Ganesa.)

Munawar Noor,2011. *Pemberdayaan Masyarakat*, Journal CIVISKS Vol. 1 No. 2 (Semarang; Universitas PGRI Semarang.)

Mutiawanthi, 2018 Tantangan “Role”/ yang dihadapi oleh mantan perawat IJ-EPA setelah kembali ke Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol.4 No.2 (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Al-Azhar Indonesia)

Nurdiana. 2017. *“Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa” Skripsi*, (Makasar, UniversitasNegri Makasar,)

Saifuddin Azwar, 2013. *MetodePenelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar,)

Septiana Yuni Lestari,2019. *“Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan studikusus di Dusun Warung Kepek Saptosari Gunung kidul”*, *Skripsi*, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Shella Putri Permadani Hardi Antono. 2019, *“Pendamping Keluarga Harapan dalam Meningkatkan kunjungan Ibu Hamil KePelayanan Kesehatan”*,*Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 14, No 2, (Jember: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember,)

Shella Yulia Rosalina. 2018. *“ Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”*,*Skripsi*, (Semarang, Universitas Negeri Walisongo Semarang,)

Soerjono Soekamto, 2002, *Teorian*, Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,)

Suharto Edi.2014. *membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pekerjaan sosial*, Bandung; PT Refika Aditama.

Syahputra Adisanjaya Suleman, 2017. Risna Resnawaty, *Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*, Journal PROSIDING KS: Riset & PKM Vol. 1 No. 24 tahun 2017 (Bandung; Universitas Padjajaran Bandung)

Totok Mardikanto,2017. Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaa nmasyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*, (Bandung; CV Alvabeta)

Usan Bagou, 2016 “Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara” *Jurnal sumberdaya manusia, Administrasi dan pelayanan public*, Vol. III, No 2, (Gorontalo, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo)

¹ Widayanti emmy. dkk, 2013. *Buku Kerja Pendamping PKH*,

Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI.



IAIN PURWOKERTO